

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan biaya hidup yang semakin banyak dan meningkat, tujuan utama pemerintah agar ekonomi tumbuh serta kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Pembangunan ekonomi paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting yang artinya kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Adapun penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator pembangun ekonomi. Ketika penyerapan tenaga kerja tinggi maka pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terdapat enam kebijakan pokok terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, pengupahan serta

kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satunya adalah tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan juga untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi. Sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya segi kuantitas atau jumlahnya saja, tetapi juga dari segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan.

Jika kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusianya baik, maka perekonomian sebuah negara bisa semakin baik. Karena hasil produksi dan pendapatannya semakin bertambah. Selain kualitas atau keahlian tenaga kerja, faktor upah juga menjadi hal yang utama. Mutu tenaga kerja juga berpengaruh terhadap upah tenaga kerja, semakin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut dilihat dari keahlian, jam terbang, dan pendidikannya tentu akan mendapatkan upah yang tinggi juga. Upah tenaga kerja di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain.

Tingkat pendapatan atau upah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan nasional. Agar bisa mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketersediaan lapangan pekerjaan juga perlu dijamin. Hal ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. Semakin besarnya ketidakcocokan antara tenaga kerja dengan perusahaan, maka akan semakin rendah tenaga kerja tersebut diterima bekerja, dan itu dapat meningkatkan masalah pengangguran.

Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Keempat, mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Kelima, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jamsostek.

Untuk itu perlunya perluasan lapangan pekerjaan untuk menampung jumlah angkatan kerja tersebut melalui sektor – sektor unggulan seperti sektor industri manufaktur. Pengembangan sektor industri manufaktur perlu terus dilakukan, karena kontribusinya dalam peningkatan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja yang signifikan terhadap nasional. Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sektor industri juga sektor yang sistem pengupahannya harus mengikuti peraturan mengenai kebijakan upah minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Sektor industri pengolahan khususnya industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional. Industri Pengolahan juga selama ini telah membawa dampak positif yang luas bagi

perekonomian nasional, seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penerimaan devisa dari investasi dan ekspor hingga penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak.

Perluasan kesempatan kerja hanya dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, tetapi perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang ada pada umumnya menghambat produksi di negara-negara berkembang adalah produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara penuh terhadap angkatan kerja (Tandiawan, 2015).

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelolah dan mengendalikan sistem ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi.

Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2015-2019 (jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
2015	114.819.199	7.560.822	122.380.021
2016	118.411.973	7.031.775	125.443.748
2017	121.022.423	7.040.323	128.062.746
2018	126.282.186	7.073.385	133.355.571
2019	128.755.271	7.104.424	135.859.695

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

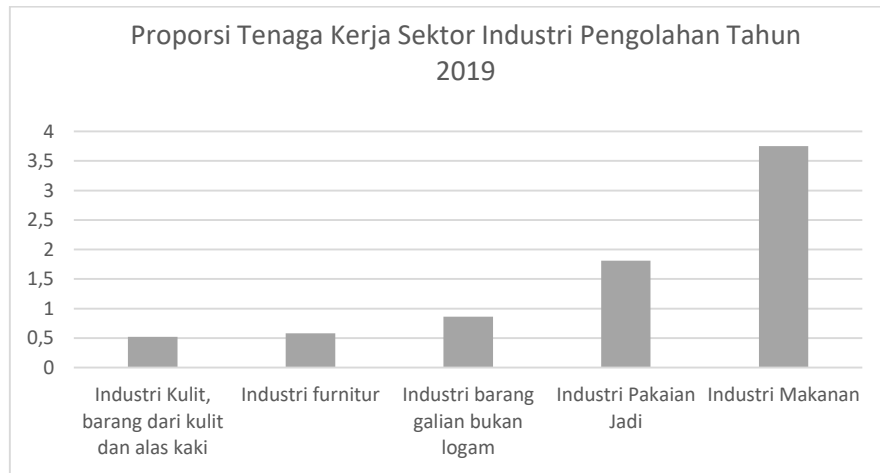
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahun nya, dari tahun 2015 yaitu 122.380.021 jiwa sampai puncaknya pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja mencapai nilai yang cukup tinggi

yaitu sebesar 135.859.695 jiwa rata-rata pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 129.020.356 jiwa.

Bertambahnya jumlah angkatan kerja mencerminkan banyaknya penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menggambarkan semakin banyak terbukanya lapangan kerja merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam menentukan proses pertumbuhan menjadi semakin jelas.

Penyerapan tenaga kerja di semua sektor merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dengan pertumbuhan penduduk yang besar dan ledakan tenaga kerja yang tidak terserap akan menimbulkan masalah keterbelakangan sehingga prospek pembangunan akan semakin melambat bahkan dapat dikatakan tidak terjadinya pembangunan yang semakin merata (Mitchel, 2005).

Gambar 1.1 Proporsi Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa proporsi tenaga kerja sektor industri pengolahan tertinggi pada sektor industri makanan dibandingkan dengan industri lainya menjadi salah satu sektor utama penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional, baik itu melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan agar semakin produktif dan berdaya saing global.

Kenaikan tenaga kerja yang terjadi pada sektor industri disebabkan oleh kegiatan industri pengolahan yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak yang bertujuan untuk dapat memenuhi target produksi yang diharapkan. Pertambahan tenaga kerja diiringi dengan kemampuan tenaga kerja untuk meningkatkan kegiatan produksi agar dapat menghasilkan output produksi, maka daya serap untuk penduduk usia produktif memiliki dampak yang baik sebagai media perluasan lapangan pekerjaan. Kondisi peningkatan ini bisa diartikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang produktif di mana sumber daya manusia bisa memproduksi serta menghasilkan hasil produksi.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak lepas dari faktor upah, karena upah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan mengenai upah minimum provinsi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dengan tingkat upah yang layak. Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya.

Dengan kata lain, upah yang dibayarkan tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum.

Tabel 1.2 Upah Bersih Pekerja Industri Pengolahan Perbulan Menurut Provinsi (rupiah)

Provinsi	Tahun		
	2017	2018	2019
Sumatera Utara	2 128 807	2 085 738	2 722 283
Kepulauan Riau	4 090 791	3 839 632	5 028 098
DKI Jakarta	4 112 547	3 966 883	4 045 325
Jawa Barat	2 948 751	2 963 607	3 010 978
Jawa Timur	2 151 216	2 206 077	2 336 469
Nusa Tenggara Timur	1 854 956	1 232 403	1 569 123
Kalimantan Timur	4 747 782	3 957 018	4 898 895
Sulawesi Tengah	1 825 647	1 905 093	2 381 158
Maluku	1 797 399	1 740 680	1 921 780
Papua	3 390 561	3 563 316	3 679 212

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, upah tenaga kerja industri besar sedang pada sektor pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing provinsi terendah pada tahun 2018 di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai upah sebesar 1.232.403 rupiah/bulan lalu untuk nilai upah yang diterima oleh pekerja paling tinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5.028.098 rupiah/bulan pada daerah provinsi kepulauan riau.

Kenaikan upah industri manufaktur tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai sistem pengupahan pekerja bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi paritas daya beli,

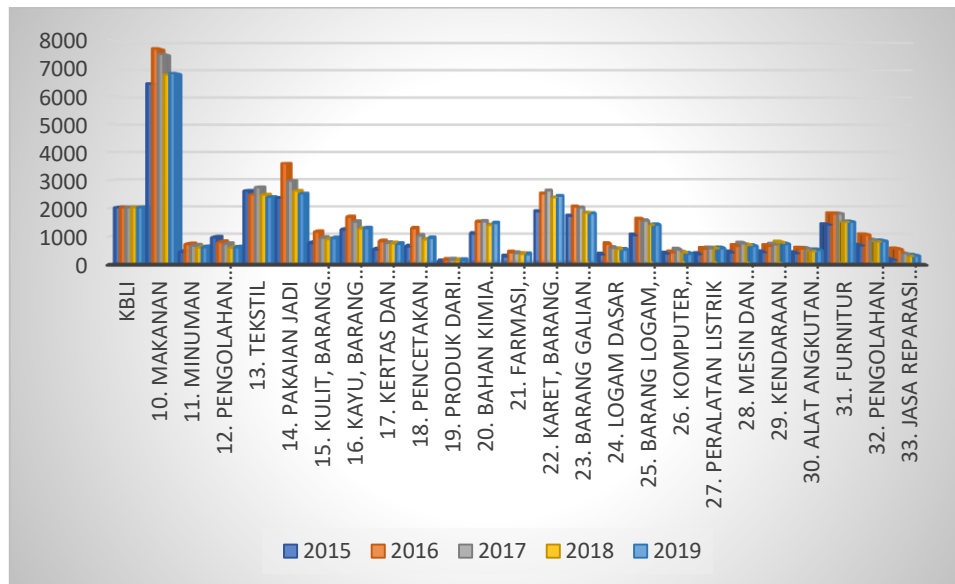
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Peraturan pemerintah tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha, Kebijakan pengupahan pekerja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dikarenakan berpengaruh terhadap daya beli pekerja, sehingga tidak tergerus oleh inflasi dan tingkat konsumsi tetap terjaga. Dengan tingkat konsumsi yang terjaga akan menjaga kesejahteraan masyarakat, mendukung tingkat konsumsi dan juga termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga harus bisa menjaga kestabilan ekonomi terkait biaya hidup yang terus meningkat. Jika pemerintah mampu mengendalikan biaya kebutuhan masyarakat, seperti biaya sewa atau beli rumah, biaya transportasi, atau harga pangan, dan sebagainya maka diharapkan tujuan dari UU cipta kerja dapat tercapai yaitu memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja

Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja

yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan. Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja kemungkinan besar akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga pertumbuhan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Karena perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Gambar 1.2 Jumlah Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Indonesia (Unit)



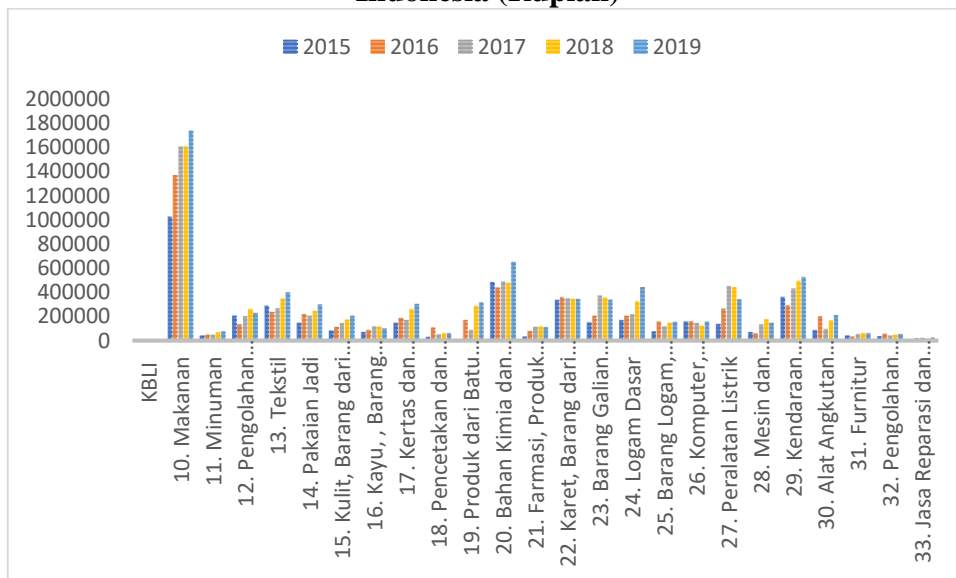
Sumber: badan pusat statistik

Jika berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 jumlah unit usaha industri pengolahan makanan dan minuman sebesar 6.875 unit usaha serta naik drastis pada tahun 2016 sebesar 8.404 unit usaha akan tetapi turun pada tahun selanjutnya hal semacam ini ada beberapa faktor seperti kurangnya modal usaha, bahan baku yang sulit, dan lain sebagainya. Industri makanan dengan jumlah unit terbanyak lalu industri

terbanyak selanjutnya yaitu industri tekstil dengan jumlah unit sebesar 2.612 pada tahun 2016 akan tetapi di tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 industri tekstil selalu mengalami penurunan jumlah industri dengan berkurangnya jumlah inndustri tersebut dapat berdampak kepada penyerapan tenaga kerja.

Hal berbeda dengan nilai output pada industri pengolahan makanan pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, faktor utama peningkatan nilai output tersebut ialah untuk memenuhi permintaan pasar maka perusahaan akan terus meningkatkan nilai outputnya hal semacam ini juga akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja ketika perusahaan meningkatkan hasil produksinya maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk menunjang kenaikan nilai output tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1.3 Jumlah Nilai Output Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Indonesia (Rupiah)



Sumber: badan pusat statistik

Berdasarkan paparan data diatas nilai output industri pengolahan sektor makanan memang memiliki nilai output paling besar serta di setiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan, disusul industri pengolahan sektor Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan nilai output terbesar kedua pada sektor ini juga selalu mengalami fluktuasi namun pada tahun 2019 nilai output yang diperoleh mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini juga bisa berdampak kepada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dengan melihat masalah latar belakang diatas, demikian pula menjadi jelas bahwa proses pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah sangat perlu dilakukan. Akan tetapi sebuah pertumbuhan ekonomi tidak akan tercipta begitu saja, sehingga perlunya melakukan berbagai analisa yang melibatkan berbagai sektor ekonomi lainnya. Untuk itu dengan memperhatikan masalah dan latar belakang secara saksama sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN IBS DI PROVINSI-PROVINSI INDONESIA TAHUN 2012-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan upah, jumlah unit usaha, nilai output dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan IBS di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2012-2019?
2. Bagaimana pengaruh upah, jumlah unit usaha, dan nilai output terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial dan simultan pada sektor industri pengolahan IBS di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2012-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan upah, unit usaha, nilai output dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan IBS di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2012-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah, unit usaha, dan nilai output terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial dan simultan pada sektor industri pengolahan IBS di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2012-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi bagi kajian ilmu ekonomi yang sejenis berkaitan dengan Industri Manufaktur serta dapat

memberikan pengetahuan, khususnya terkait dengan kelompok bidang industri pengolahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut;

1. Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
2. Sebagai pengalaman untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari
3. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa mendatang